

## TEMPAT TINGGAL KAUM MENAK PRIANGAN

Nina Herlina

Guru Besar Ilmu Sejarah Departemen Sejarah dan Filologi Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang

E-mail : nina.herlina@unpad.ac.id

**ABSTRAK.** Nama wilayah Priangan, semula adalah Sumedanglarang. Ketika diserahkan kepada Sultan Agung dari Mataram, namanya diubah menjadi Priangan. Selanjutnya sesudah jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda Gubernur Jenderal H.W. Daendels pada tahun 1808 menetapkan Priangan menjadi *Prefectuur Preanger-Regentschappen* dan pada masa pemerintahan Inggris (1811-1816), Thomas Stamford Raffles, diganti menjadi Keresidenan Priangan, yang terdiri atas lima kabupaten yaitu; Bandung, Cianjur, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura. Pemerintahan di setiap kabupaten dijalankan oleh kelompok aristokrasi lokal di bawah pengawasan penjajah. Kelompok aristokrasi lokal, yang disebut kaum *ménak* ini, terdiri atas para bupati, bawahan bupati, dan sanak kerabat mereka. Kaum menak memiliki gaya hidup (*style of life*) tersendiri, termasuk memiliki tempat tinggal khusus yang membedakan mereka dengan rakyat kecil. Dalam tulisan ini secara khusus akan diuraikan tentang tempat tinggal kaum menak di Priangan, sejak 1800 hingga 1942. Berbagai informasi yang beragam itu dikoroborasikan untuk menghasilkan suatu rekontruksi tentang tempat tinggal kaum menak di Priangan. Untuk itu dilakukan penelitian menggunakan metode sejarah yang terdiri atas empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Untuk memberikan eksplanasi tentang tempat tinggal kaum menak diperlukan pendekatan yang bersifat multidimensi, selain pendekatan historis juga dilakukan pendekatan filologis, antropologis dan sosiologis. Tempat tinggal kaum menak semula bergaya aristektur seperti keraton dengan pendopo di depannya. Selanjutnya karena pengaruh Eropa, gaya arsitektur itu bercampur dengan gaya barat dan lebih dikenal sebagai *regent-woning* (rumah bupati) dengan perabotan yang bergaya keraton.

**Kata Kunci:** Priangan; Kaum menak; gaya hidup; *regents woning*; pendopo; pendekatan multidimensi; eksplanasi.

### THE RESIDENCES OF THE PRANGAN ARISTOCRACY

**ABSTRACT.** Before the region came to be known as Priangan, it was referred to by its earlier name, Sumedanglarang. After its transfer from Mataram to Sultan Agung, the name was changed to Priangan. When the region later came under the control of the Dutch East Indies administration, Governor-General H. W. Daendels renamed it *Prefectuur Preanger-Regentschappen*. During the British interregnum (1811–1816), Thomas Stamford Raffles further changed the administrative designation to Priangan Residence, which comprised five regencies: Bandung, Cianjur, Sumedang, Limbangan, and Sukapura. Each regency was governed by local aristocratic elites under colonial supervision. This local aristocracy, known as the *ménak*, consisted of regents, their assistants, and their extended families. These *ménak* elites led exclusive lifestyles and lived in houses that clearly distinguished them from the peasant class. This article specifically explores the residences of the Priangan aristocracy from 1800 to 1942. Various historical sources are corroborated to reconstruct an account of these elite dwellings. The study employs a four-step historical method comprising heuristics, criticism, interpretation, and historiography. It also integrates historical, philological, anthropological, and sociological approaches to offer a multidimensional understanding of the aristocratic residential spaces. The buildings often adopted architectural styles reminiscent of keraton palaces, typically featuring a front-facing pendopo. Due to the influence of European culture, this architectural style later evolved into a hybrid form, with Western elements incorporated. These residences became known as *regent-woning* (regent's houses), furnished and decorated in ways that preserved keraton-inspired aesthetics.

**Keywords:** Priangan; the *ménak* aristocrat; lifestyle; *regents woning*; pendopo; multidimensional approach; explanation

### PENDAHULUAN

Setelah Kerajaan Sunda runtuh, wilayah kekuasaannya yang hampir meliputi seluruh Propinsi Jawa Barat sekarang ditambah sebagian Jawa Tengah, terbagi-bagi ke dalam empat pusat kekuasaan yaitu Banten, Cirebon, Sumedanglarang, yang semula merupakan bawahan Kerajaan Sunda, dan Galuh yang setelah kepindahan pusat kerajaan ke Pakuan

Pajajaran masih tetap eksis sebagai kerajaan kecil (Lubis, 1998:50).

Sumedanglarang berusaha menampilkan diri sebagai penerus Kerajaan Sunda. Akan tetapi, usaha ini gagal; pertama, karena adanya kekuatan kerajaan lain yang mengepung dari berbagai arah, yaitu Kesultanan Banten dari sebelah barat, Kesultanan Cirebon dari sebelah utara, dan Kerajaan Mataram dari sebelah timur; kedua, karena tindakan Prabu

Geusan Ulun sebagai *nalendra* (penguasa) Sumedanglarang sendiri yang melemahkan kekuasaannya. Faktor pertama berhasil diatasi dengan melakukan pendekatan tertentu. Geusan Ulun menyatakan diri masuk Islam di Cirebon dan kemudian berguru ke Demak untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Kesultanan Cirebon secara tidak langsung merasa superioritasnya diakui meskipun hanya dari segi keagamaan. Cirebon pun mengakui kedudukan Geusan Ulun sebagai penguasa Sumedanglarang. Situasi ini menjadi rusak setelah Geusan Ulun melakukan tindakan tercela. Sepulang berguru dari Demak, ia singgah di Cirebon. Di sana ia jatuh cinta kepada Ratu Harisbaya yang muda dan cantik, istri Panembahan Ratu, Sultan Cirebon yang sudah tua. Wanita itu dilarikannya ke Sumedang sehingga Sultan Cirebon marah. Akibatnya, terjadi peperangan antara Sumedanglarang dan Cirebon. Pertikaian ini baru bisa diselesaikan setelah daerah Majalengka diserahkan oleh Geusan Ulun sebagai penebus kesalahannya kepada Panembahan Ratu. Akibat perbuatan Geusan Ulun, banyak rakyat meninggalkan Sumedang sehingga Kerajaan Sumedanglarang menjadi lemah. Ketika datang ancaman dari Kerajaan Mataram, Sumedanglarang merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya sehingga putra Prabu Geusan Ulun, yaitu Aria Suriadiwangsa I yang menggantikan ayahnya selaku penguasa Sumedanglarang, menyatakan penyerahan dirinya kepada Mataram sekitar tahun 1620. Nama wilayah Sumedanglarang kemudian diganti menjadi *Priangan* (Lubis, 1998:51-52)

Wilayah Priangan ini juga meliputi daerah Galuh yang sudah ditaklukan terlebih dahulu oleh Mataram pada tahun 1595. Selanjutnya Sultan Mataram membagi-bagi wilayah Priangan, yang dalam sumber-sumber Belanda disebut *Westerlanden*, menjadi kabupaten-kabupaten yang masing-masing dikepalai oleh seorang bupati. Untuk mengawasi serta mengkoordinasikan para bupati ini, salah seorang bupati yang dianggap terkemuka atau cukup berpengaruh diangkat menjadi wedana bupati. Wedana bupati pertama adalah Rangga Gempol I (1620 - 1625), yang kedua adalah Dipati Ukur (1625 - 1629), dan yang terakhir adalah Pangeran Rangga Gempol II (1641 - 1656). Setelah yang terakhir ini, jabatan wedana bupati dihapuskan dan selanjutnya para bupati bertanggung jawab langsung kepada Sultan Mataram (Lubis, 1998).

Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, putranya yaitu Sunan Amangkurat I meneruskan reorganisasi wilayah barat. Daerah

itu dibagi menjadi dua belas *ajeg* yaitu: Sumedang, Parakan-muncang, Bandung, Sukapura, Krawang, Imbanagara, Kawasen, Wirabaya (Galuh), Sekace, Banyumas, Ayah, dan Banjar. Kekuasaan Mataram atas Priangan berakhir dengan adanya perjanjian 19 - 20 Oktober 1677 dan 5 Oktober 1705, antara Mataram dengan VOC. Dalam perjanjian pertama disebutkan bahwa Mataram menyerahkan wilayah Priangan Timur kepada VOC, sedangkan dalam perjanjian kedua Mataram menyerahkan wilayah Priangan Tengah dan Priangan Barat kepada VOC. Penyerahan wilayah Priangan kepada VOC dilakukan Mataram sebagai balas jasa kepada VOC yang telah membantu menyelesaikan perebutan kekuasaan di Mataram. Pengambilalihan wilayah Priangan tidak berlangsung cepat. Baru pada tanggal 15 Nopember 1684, Komandan Jacob Couper. dan Kapten Joachum Michiels menangani daerah Priangan atas perintah Gubernur Jenderal Johannes Camphuijs. Bupati pertama yang mendapat surat pengangkatan dari VOC adalah Wangsatanu yang ditetapkan menjadi Bupati Pamanukan pada tanggal 24 Desember 1701 (Lubis, 1998: 53).

Pada tahun 1706 Pangeran Aria Cirebon diangkat sebagai pengawas (*overseer*) bupati-bupati Priangan, kecuali Krawang dan Cianjur yang sudah dianggap termasuk wilayah Batavia. Kedudukan Pangeran Aria Cirebon dikukuhkan berdasarkan Resolusi 9 Februari 1706. Sebelumnya, Pangeran Sumedang juga mengajukan permohonan untuk menjadi wedana bupati. Permohonan ini ditolak karena VOC berpendapat bahwa kedudukan para bupati Priangan semuanya sama dan semuanya mengabdikan langsung kepada VOC. Setelah Pangeran Aria Cirebon meninggal tahun 1723, ternyata tidak diangkat penggantinya. Putra Pangeran Aria Cirebon, Martawijaya, mencoba mengajukan permohonan untuk mengisi jabatan ayahnya, tetapi ditolak karena jabatan wedana bupati tidaklah untuk diwariskan (Lubis, 1998:54)

Setelah pemerintahan berpindah dari tangan VOC ke tangan Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-19, terjadi lagi reorganisasi wilayah pemerintahan. Gubernur Jenderal H.W. Daendels pada tahun 1808 membagi Pulau Jawa atas sembilan *prefectuur*. Setiap *prefectuur* dipimpin oleh seorang *prefect*. Ketika Daendels meletakkan jabatannya, wilayah Priangan yang sebenarnya hanya terdiri dari kabupaten-kabupaten: Cianjur, Bandung, Sumedang, Parakanmuncang, dan Karawang. Wilayah ini dikenal juga sebagai *Prefectuur Preanger-*

*Regentschappen*. Pada masa pemerintahan-penyelang (*interregnum*) Inggris (1811-1816), Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Inggris, memperkenalkan istilah *keresidenan* sebagai pengganti *landdrost-aniht*. Sejak saat itu dikenal istilah residen sebagai pemimpin keresidenan yang berkedudukan di ibu kota keresidenan. Pada akhir masa pemerintahan Inggris, Pulau Jawa terbagi atas 16 keresidenan, salah satu di antaranya adalah Keresidenan Priangan, seperti tertuang dalam ketentuan 10 Agustus 1815. Ibu kota Keresidenan Priangan adalah Cianjur. Kabupaten Karawang tidak termasuk ke Keresidenan Priangan, tetapi digabungkan ke Keresidenan Bogor. Pada masa pemerintahan Raffles ini, diperkenalkan pula jabatan baru yaitu *wedana* yang mengepalai distrik (Lubis, 1998:54).

Setelah beberapa dekade kabupaten-kabupaten yang ada di Priangan mengalami, reorganisasi hingga pada tahun 1859 menjadi lima kabupaten yaitu; Bandung, Cianjur, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura. Pada tahun 1864 ibu kota Keresidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung berdasarkan beslit bertanggal 17 Agustus 1864 no. 18.

Jadi, pada abad ke-19, Priangan terdiri atas beberapa kabupaten yang jumlah dan luasnya berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah kolonial. Pemerintahan di setiap kabupaten dijalankan oleh kelompok aristokrasi lokal di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda, dengan diselengi selama enam tahun (antara tahun 1811-1816) oleh Pemerintah Inggris. Kelompok aristokrasi lokal, yang disebut kaum *ménak* ini, terdiri atas para bupati, bawahan bupati, dan sanak kerabat mereka. Sebagian dari para bupati ada yang dianggap berasal dari keturunan raja-raja Sunda, artinya benar-benar bangsawan; ada juga yang dianggap bukan berasal dari keturunan raja-raja, melainkan dari kalangan rakyat biasa yang karena jasanya bisa menjadi bangsawan. Secara etimologis bupati diartikan sama dengan raja. Rakyat juga menganggap bahwa bupati adalah ratu mereka.

Kaum menak memiliki gaya hidup (*style of life*) tersendiri. Yang dimaksud dengan gaya hidup mengandung pengertian yang meliputi karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam kehidupan suatu golongan masyarakat. Lebih lanjut dapat dijelaskan, gaya hidup menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan bermasyarakat, Bagaimana bertingkah laku di depan umum, dan

bagaimana mereka membedakan statusnya dari orang lain melalui lambang-lambang. Gaya hidup menyangkut berbagai tatacara, adat kebiasaan, struktur kelakuan, lambang-lambang, sikap hidup, serta mentalitas yang secara keseluruhan mempengaruhi kehidupan sehari-hari suatu golongan masyarakat. Lambang-lambang yang dimiliki kaum *ménak* merupakan campuran antara lambang kebangsawanan (aristokrasi) dan lambang jabatan dalam pemerintahan. Adanya lambang-lambang ini dapat dikenali dalam: gelar dan nama, pakaian dan perlengkapannya, bentuk tempat tinggal (rumah), sopan-santun (etiket) dan bahasa yang dipergunakan, pusaka turun-temurun, serta upacara-upacara yang dijalankan sepanjang hayat kaum *ménak*. (Lubis, 1998).

Dalam tulisan ini secara khusus akan diuraikan tentang tempat tinggal kaum menak di Priangan, sejak 1800 hingga 1942.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Garraghan, 1957; Gottschalk, 1968). Tahap pertama, heuristik yaitu menelusuri dan menghimpun sumber sejarah yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Untuk memperoleh sumber yang otentik, dilakukan kritik eksternal sedangkan untuk memperoleh sumber yang kredibel, dilakukan kritik internal. Untuk memperoleh fakta sejarah, data yang sudah melalui tahap kritik, dikoroborasi dengan sumber pembanding yang tidak saling berkaitan. Fakta tersebut kemudian diinterpretasi, baik secara analisis maupun sintesis. Rangkaian fakta yang telah diinterpretasi secara logis, kemudian direkonstruksi menjadi historiografi tentang tempat tinggal kaum menak Priangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaum *ménak* (bangsawan Sunda) memiliki tempat tinggal yang mudah dibedakan dari rumah rakyat jelata, baik dilihat dari ukuran, bentuk gaya bangunan, maupun bahannya. Pada pertengahan abad ke-19 di Bandung misalnya, rumah rakyat jelata dapat dikenali dari dindingnya yang terbuat dari bambu dan atapnya bukan terbuat dari genting (Martanagara, 1923: 37). Rumah kaum *ménak* umumnya dibuat dari tembok dan berukuran

relief besar lengkap dengan beranda berbentuk pendapa.

Bangunan tempat tinggal *ménak tertinggi* di kabupaten, yaitu bupati, sangat eksklusif dan terletak di ibu kota kabupaten. Tempat tinggalnya secara khusus disebut *kabupaten* atau *dalem*. Pada mulanya kabupaten dibangun sendiri oleh bupati, tetapi sejak pertengahan abad ke-19 dirancang dan dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda; dalam hal ini dilakukan oleh dinas yang disebut *Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W.)* atau Dinas Pekerjaan Sipil Umum. Gedung kabupaten yang dibangun B.O.W. biasa disebut *regentswoning* (rumah bupati). Perbedaan antara rumah yang dibangun oleh bupati sendiri dan yang dibangun oleh B.O.W. terletak pada arsitektur bangunannya. Yang pertama berarsitektur tradisional seperti ditunjukkan dari bahan bangunan yang banyak menggunakan kayu jati, beratapkan ijuk, dan pilar-pilar (tiang) terbuat dari kayu jati berukir. Bangunan jenis kedua lebih menonjolkan arsitektur Eropa dengan bahan bangunan tembok, atap genting, dan pilar-pilar gaya Yunani. Persamaan antara keduanya, yaitu adanya unsur-unsur penting dalam kompleks rumah bupati, alun-alun, *pendopo*, dan bagian dalam kabupaten. Bentuk kompleks kabupaten ini merupakan miniatur ibu kota kerajaan di Jawa. Skema sebuah kabupaten dapat dilihat dalam beberapa buku (Mayer, t.t.: 486; Eerde, 1943:240).

Menurut sumber tradisional, Radén Sepat, seorang ahli bangunan dari Kerajaan Majapahit, pernah dimintai bantuan untuk membangun kompleks Keraton Cirebon pada awal abad ke-15. Pola kompleks ini kemudian ditiru oleh Mataram pada awal abad ke-17 dan juga oleh kabupaten-kabupaten di Priangan (Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, 1991: 54-55).

*Alun-alun* sebagai jantung kota tradisional di Jawa pada masa kerajaan-kerajaan Jawa dahulu, sebenarnya merupakan pekarangan atau halaman depan keraton yang dipergunakan untuk berbagai keperluan, misalnya *watangan* (latihan perang-perangan dengan naik kuda bersenjata tombak) dan *rampogan* (adu macan). Alun-alun di keraton Jawa itu biasanya ada dua; di atasnya dihamparkan pasir sehingga rumput tidak bisa tumbuh. Ukuran setiap sisi alun-alun biasanya 300 m. Berbeda dengan di keraton-keraton Jawa, alun-alun di kabupaten-kabupaten Priangan biasanya merupakan tanah lapang berumput yang berukuran lebih kecil. Di pinggirnya ditanam pohon beringin (kadang-kadang juga hanya di sebagian sisinya). Di tengah-tengah ditanam sebatang atau sepasang

beringin yang biasanya diberi pagar sehingga disebut beringin kurung. Beringin ini adalah lambang kekuasaan yang bersifat ketuhanan (Eerde, 1943: 213). Pohon beringin di sekeliling alun-alun melambangkan pengayoman pemerintah terhadap seluruh wilayah kekuasaannya. *Alun-alun* juga terdapat di depan tempat tinggal bupati dan di depan tempat tinggal wedana yang fungsinya adalah untuk upacara-upacara atau pesta yang terbuka untuk umum (De Commissie voor het Adatrecht, 1914: 62.; Hoevell, 1849:22). W.R. van Hoevell yang singgah di ibu kota Kabupaten Cianjur menceritakan situasi kota tersebut pada tahun 1847 demikian. Alun-alun merupakan sebuah lapangan segi, empat yang ditanami beringin; di sebelah selatan ada gedung kabupaten dan di sebelah barat ada mesjid. Di bagian lain ada "daerah Eropa"; disebut demikian karena di sana ada gedung tempat tinggal residen. Selain itu, ada penjara dan gudang-gudang; selebihnya adalah gubuk-gubuk penduduk yang tersembunyi di bawah kerimbunan pepohonan. Pola semacam ini dijumpainya pula di lima ibu kota kabupaten di Priangan. Dalam bentuk yang lebih sederhana (tanpa "wilayah Eropa") juga ditemuinya di desa-desa.

Di alun-alun Kabupaten Bandung, beringin hanya ditanam di sisi sebelah barat dan timur, sedangkan di tengahnya pada tanggal 8 September 1898 ditanam beringin yang disebut *Wilhelmina-boom* untuk memperingati pelantikan Wilhelmina sebagai Ratu Belanda (*Wilhelmina-boom* juga ditanam di alun-alun Kabupaten Serang). Kemudian, pada tahun 1909, di sebelahnya ditanam beringin yang disebut *Juliana-boom* untuk memperingati kelahiran Putri Juliana pada tahun tersebut. Konon, kedua pohon itu runtuh bertepatan dengan runtuhnya kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1942 (Djajadiningrat, 1037:105) Di sebelah selatan alun-alun terletak gedung kabupaten; di sebelah baratnya terletak mesjid agung; di sebelah utara terletak kediaman pejabat Belanda (asisten residen) dan di sebelah timur kadang-kadang ada sekolah pribumi, penjara, atau gedung pemerintah lainnya. Sebelum tahun 1920 di sebelah timur alun-alun Bandung terdapat tempat tinggal putra sulung bupati, tetapi setelah tahun tersebut tempat itu dijadikan arena hiburan. Sementara itu, di sebelah tenggara alun-alun Bandung dibangun Bale Bandung tempat rapat patih dan jaksa dan di depan bangunan ini didirikan tempat menggantung orang hukuman.

Bangunan kabupaten yang berarsitektur tradisional di Priangan hampir tak bersisa, kecuali di Kabupaten Sumedang. Sejak

pertengahan abad ke-19 gedung-gedung kabupaten dirancang-bangun dengan gaya Eropa sehingga sulit untuk melacak bagaimana bentuk bangunan sebelumnya. Oleh karena itu, yang diuraikan di sini hanya sebagian yang tradisional dan selebihnya adalah *regents woning* yang hingga kini sisasisanya masih dapat dilihat bahkan ada yang masih dipergunakan sebagai kantor kabupaten. Sesuai dengan statusnya sebagai orang yang berada pada puncak stratifikasi sosial, bupati memiliki tempat tinggal yang paling besar dan paling megah di wilayah pemerintahannya. Kebanyakan gedung kabupaten dikelilingi kebun atau taman yang luas dan dipisahkan dari alun-alun dengan pagar tembok yang memiliki pintu gerbang atau *gapura* menghadap ke alun-alun. Bangunan kabupaten terdiri dari dua bagian; yang pertama adalah bagian depan yang merupakan bangunan terbuka dengan disangga tiang-tiang. Bagian yang disebut *pendopo* ini ditutupi atap yang bentuknya tidak sama untuk semua kabupaten. Ada yang berbentuk limas bersusun dua, misalnya gedung kabupaten di Tasikmalaya; ada juga yang atapnya bersusun tiga, misalnya gedung kabupaten di Bandung, dan ada juga yang berbentuk *julang ngapak* seperti *pendopo* kabupaten di Garut. *Pendopo* dipergunakan untuk berbagai pesta, resepsi, upacara, atau pertemuan, baik yang bersifat resmi maupun yang tidak resmi. Di salah satu sisi, biasanya diletakkan gamelan dan seperangkat wayang golek yang merupakan kebanggaan bupati. Di samping itu, ada seperangkat meja kursi untuk bupati dan para tamu agung. Langit-langit dan tiang-tiang pada bangunan tradisional dibuat dari kayu jati berukir indah seperti yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Pada bangunan bergaya Eropa tiang-tiang *pendopo* berupa pilar bergaya Yunani. Di tengah *pendopo* bangunan tradisional terdapat tiang yang disebut *sokoguru* yang memiliki arti simbolis penting. Tiang ini melambangkan sebuah pemerintahan yang mendukung kerajaan dan di bawah tiang ini dilakukan pembahasan pembahasan masalah kenegaraan. Tiang ini juga mengandung nilai spiritual. Pada waktu kabupaten dibangun, di bawah *sokoguru* biasanya ditanam kurban persembahan sebagai tumbal untuk melindungi keluarga bupati sekaligus memelihara keselarasan dan keseimbangan. Konon, kurban ini dulu berupa kepala manusia, tetapi akhirnya diganti dengan kepala kerbau (Sutherland,

1983: 58). *Sokoguru* juga dianggap sebagai pusaka kabupaten yang bersifat sakral dan dilindungi oleh roh para leluhur atau para pendiri kabupaten. Apabila sebuah bangunan kabupaten akan dipugar atau dipindahkan, tiang ini turut dipindahkan dan disertakan dalam bangunan yang baru dengan suatu upacara khusus. Sebagian masyarakat mempercayai bahwa *sokoguru* ini ada penghuninya yang berupa makhluk halus. Bagian yang kedua dari gedung kabupaten biasa disebut *dalem*.

Bagian ini terletak di sebelah dalam yang dihubungkan dengan *pendopo* melalui sebuah gang lebar berlantai dan beratap. Gang terbuka ini disangga dengan pilar-pilar yang besar, dahulu dibuat dari kayu jati, sedangkan pada bangunan bergaya Eropa dibuat dari tembok. Bagian *dalem* ini terdiri dari ruangan depan yang cukup luas untuk berbagai kegiatan istri-istri bupati dan anak-anaknya. Kemudian disambung dengan bagian belakang melalui sebuah lorong lebar. Di kiri-kanan lorong tersebut terdapat kamar-kamar berukuran besar untuk bupati dan istri-istrinya. Di belakang terdapat ruang makan yang berpintu di setiap sisi ruangan lengkap dengan jendela-jendela berukuran tinggi seperti layaknya rumah bergaya Eropa. Di samping ruang makan ada ruangan yang lebih kecil dari kamar tidur bupati. Biasanya di sini disimpan pusaka-pusaka milik bupati.

Pembagian ruangan di setiap kabupaten pada dasarnya sama, tetapi menurut pengamatan penulis di lapangan ada juga perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil, misalnya dalam bentuk jendela, bentuk pilar di bagian depan, dan bentuk atap. Ruangan-ruangan bagian dalam merupakan bagian penting dalam kehidupan keluarga bupati, terutama bagi para istri dan anak-anak bupati yang amat jarang berpartisipasi dalam resepsi-resepsi dan upacara-upacara sehingga sebagian besar waktu mereka dihabiskan di sini. Anak-anak bupati yang perempuan dikumpulkan di bagian bangunan yang disebut *kaputrén*, sedangkan anak-anak laki-laki dipisahkan di bagian lain. Kadang-kadang ada ruangan yang dinamai secara khusus, misalnya di *padaleman* Kabupaten Bandung ada sebuah ruangan yang dinamai Ruang Arab karena dekorasinya yang didominasi suasana Arab (misalnya dindingnya dihiasi kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran). Di bagian belakang bangunan utama terdapat sekelompok bangunan yang biasanya membentuk huruf U dan dihubungkan dengan sebuah gang beratap. Kelompok bangunan ini biasanya

diperuntukkan bagi keluarga bupati yang lain, misalnya orang tua bupati, anak laki-laki bupati (yang sudah dewasa), dan sanak kerabat yang mengabdikan kepada bupati. Wajar bila bangunan kabupaten harus cukup luas untuk keluarga besar (*extended family*) semacam ini, ditambah lagi dengan para pelayan yang jumlahnya cukup banyak. Di bagian belakang ini pula terdapat kamar-kamar pelayan, gudang makanan, dapur, dan istal.

Di sekitar area gedung kabupaten sering kali ada kolam atau empang yang cukup besar tempat memelihara ikan *gurame*, ikan mas, atau jenis ikan lainnya. Ikan-ikan ini dimaksudkan, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk menjamu tamu-tamu bupati. Kolam kadang-kadang dipakai untuk tempat bercengkrama. Di Bandung sekarang misalnya ada daerah yang disebut *Balong Gede* (artinya: kolam besar) yang terletak di belakang gedung kabupaten dahulu. Sekarang kolam milik bupati tersebut sudah tak ada lagi berubah menjadi pemukiman dan pertokoan.

Di Kabupaten Sumedang, gedung kabupaten bergaya Eropa yang disebut *Gedung Negara* atau *Gedung Béngkok* (didirikan tahun 1850) hanya dipergunakan untuk resepsi atau upacara resmi serta penginapan para tamu agung. Bupati lebih suka tinggal di bangunan kabupaten tradisional yang disebut *Srimanganti* yang dibangun tahun 1706. Untuk keluarga bupati, pada tahun 1850 dibangun sebuah gedung berciri khas Sunda yang disebut *Bumi Kalér* (Rumah Utara) karena terletak di sebelah utara *Srimanganti*. Bangunan seluruhnya terbuat dari jati dan didirikan di atas tiang-tiang penyangga sehingga merupakan rumah panggung yang memiliki *kolong*. Bentuk bangunan seperti ini memiliki arti simbolis tertentu. Dilihat dari struktur rumah panggung tampak di sini adanya konsep pembagian tiga, yaitu adanya dunia bawah (tanah), dunia tengah (rumah atau alam semesta), dan dunia atas (langit). Rumah sebagai analogi alam semesta harus bersifat netral sehingga tidak boleh langsung menyentuh tanah. Oleh karena itu, harus disangga dengan tiang. Tiang sebagai bagian dari rumah (kaki rumah) harus diberi alas batu yang disebut *tatapakan* atau *batu umpak* (Adimihardja et al., 1981: 4).

Pusaka milik bupati Sumedang yang jumlahnya banyak disimpan di sebuah bangunan yang disebut *Gedung Gendeng*. Gedung ini dibangun pada tahun 1850. Tidak jauh dari bangunan-bangunan ini terdapat

*empang* ternpat memelihara ikan *kancra*. Setiap bulan Mulud ikan-ikan ini dipanen untuk keperluan pesta perayaan Muludan (yaitu merayakan hari lahir Nabi Muhammad S.A.W.) dan sisanya dibagikan kepada fakir-miskin (Kartadibrata. 1989:12).

Keputusan Pangeran Sugih, Bupati Sumedang (1836-1882), untuk tetap tinggal di *Srimanganti* dan menjadikan *regentswoning* hanya untuk keperluan khusus, kiranya dapat dianggap menyiratkan adanya ketidakcocokan selera dengan bangunan bergaya Eropa itu. Hal ini sesuai dengan berbagai pendapat bupati di daerah lain yang kurang suka tinggal di rumah bergaya Eropa, seperti dimuat dalam laporan bertanggal 4 Agustus 1862 oleh Direktur B.O.W. yang menangani perancangan dan pembangunan *regentswoning* (Soeria Nata Atmadja, 1940:210). Bupati Ciamis, R.A.A. Kusumadinigrat (1839-1886) juga lebih suka tinggal di bangunan kabupaten tradisional terbuat dari kayu jati yang dinamainya *Keraton Selagang-ga*. Ia tinggal di *Gedung Negara* hanya bila ada tamu agung (Team Peneliti Sejarah Galuh, 1972 : 68).

Adanya sikap seperti yang ditunjukkan oleh para bupati di atas dapat dijelaskan demikian. Pembaharuan-pembaharuan yang ditawarkan oleh orang-orang Belanda kepada elite pribumi tidak semua dapat diterima begitu saja. Meskipun para bupati bisa dianggap sebagai inovator atau *agent of change* dalam menghadapi budaya Barat, ada kalanya kecenderungan untuk bersikap tradisional dimunculkan bila unsur budaya yang baru dianggap kurang cocok. Komunikasi para bupati dengan orang-orang Belanda yang cukup intensif menyebabkan para bupati tidak bisa sepenuhnya menolak pembaharuan yang ditawarkan, apalagi si pembawa budaya baru dalam hal ini lebih dominan dan memiliki otoritas tinggi. Dalam hal ini para bupati bersikap adaptif inovatif, terbukti dengan persetujuan mereka terhadap pemakaian bahan bangunan yang lebih kuat dan tahan lama. Yang tidak mereka setuju terutama soal pembagian ruangan; misalnya, tidak adanya ruang khusus untuk tamu-tamu wanita yang diundang ke pesta kabupaten dan tidak adanya ruang yang cukup terpisah untuk keluarga bupati lainnya. Demikian menurut surat Direktur B.O.W. seperti telah disebut di atas. Tidak tertutup kemungkinan bahwa penolakan beberapa bupati terhadap adanya gedung bergaya Eropa ini karena bangunan gaya baru tidak memperhatikan makna simbolis yang terkandung dalam rumah gaya lama. Ternyata

keberatan para bupati tidak digubris oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan alasan, gedung kabupaten yang dirancang bangun gaya Eropa itu sudah diperhitungkan sesuai dengan upaya pemerintah untuk menghemat belanja negara. Dalam surat keputusan Gubernur Jenderal tertanggal 25 September 1862, no. 12, dinyatakan bahwa model rumah bupati tidak harus seragam (artinya disesuaikan dengan kondisi) dan pembangunaruwa harus menggunakan biaya yang semurah-murahnya serta tak perlu mengikuti kemauan bupati.

Tempat tinggal bupati sebagai "raja" di mata rakyat haruslah megah dan harus melambangkan kesempurnaan. Bupati Sukapura, Radén Adipati Wiradadaha yang perilakunya dianggap sangat baik, dalam menjalankan pemerintahan ternyata disebut belum sempurna, karena belum memiliki *padaleman* yang pantas. Dalam *Sajarah Sukapura* disebutkan demikian: "*Eta mungguh karajaan, pitu-turna para sepuh, nu natal kudu santosa, dikepung ku pager huni, la-zvangna make dijaga* (artinya: "Demikian mengenai kerajaan, menurut tuturan orang tua-tua, keraton harus teguh-kukuh, dilindungi pagar hingga tertutup rapat serta berpenjaga di pintu gerbangnya"). Dengan *padaleman* yang seperti itu, orang tidak bisa masuk sembarangan sehingga derajat kabupaten terjaga dan kedudukan tidak direbut orang lain serta tetap lestari. Dalam sumber tradisional ini disebutkan pula, bahwa tempat tinggal Bupati Sukapura waktu itu, keadaannya masih tampak terbuka, baik dari muka maupun belakang, sehingga pemandangan ke kabupaten tampak jelas, tidak jauh berbeda dengan waning atau rumah somah. Bila keadaan terus dibiarkan, akan menimbulkan enam akibat yaitu: pertama, daya kekuatan atau kewibawaan ratu akan hilang sehingga keraton tidak disegani orang; kedua, orang luar bisa masuk sembarangan saja karena tidak mengetahui bahwa bangunan itu keraton, sehingga hilang tata tertib negeri, berkurang kea-gungannya, pudar cahayanya; ketiga, bila bupati sedang ada di dalam bersama para istrinya, atau sedang makan, kebetulan ada orang bermaksud menghadap, orang tersebut bisa saja terus masuk, karena tidak ada penaga di depan, akibatnya segala rahasia *padaleman* tampak jelas; keempat, kedudukan bupati bisa saja tercemar, kalau-kalau ada orang menyelundup ke *padaleman* lalu melakukan tindakan melanggar susila; kelima, tanpa penjagaan, orang yang bermaksud buruk atau mau mencelakakan bupati bisa masuk dengan bebas, sehingga timbul malapetaka; dan keenam, para penghuni *padaleman* (wanita?) tanpa dijaga dengan

baik, bisa saja keluyuran ke mana-mana. (Hermansoemantri, 443, 514-515).

Tempat tinggal kaum *ménak* lainnya yang berada di bawah bupati, tampaknya juga meniru pola kabupaten, hanya saja ukurannya lebih kecil. Dalam *Wawacan Carios Munada*, disebutkan ada seorang jaksa yang memiliki "keraton yang indah" (Ekadjati (ed.), 1991:27).

Dari pernyataan ini jelas tersirat adanya unsur meniru rumah panutan yang diibaratkan sebagai keraton, sekaligus juga menyiratkan bahwa rumah yang dimiliki *ménak* tersebut mewah ataupun megah seperti sebuah keraton. Rumah tempat tinggal *ménak tinggi* kadang-kadang juga disebut *keraton* atau *puri* (Kartadinata, 1921:54).

Amat sulit untuk mencari sisa-sisa rumah yang masih berarsitektur tradisional. Dan foto yang tersisa (lihat lampiran di belakang) dapat dilihat bahwa bagian depan rumah seorang wedana merupakan miniatur *pendopo*. Menurut keterangan lisan, bagian belakang rumah ditata seperti kabupaten. Jadi, ada kamar-kamar berjajar membentuk huruf U yang diisi oleh kerabat wedana dan para pembantu yang terdiri dari: *koki* (tukang masak), tukang kebun, *babu* (pembantu perempuan yang bertugas membereskan rumah), tukang kuda, dan lain-lain. Di Ciamis, seorang *hoofddjaksa* menempati rumah kopel terbuat dari tembok, juga bergaya Barat. Rumah sebelahnya diisi oleh seorang Penilik Sekolah (*Schoolopziener*) Belanda. Meskipun jumlah kamar tidak begitu banyak, tapi masih bisa menampung beberapa keponakan yang disekolahkan oleh *hoofddjaksa* tersebut. Di samping rumah terdapat taman dan kebun yang luas lengkap dengan kolam ikan. Bila malam hari tiba, juru tulis (kadang-kadang dengan istrinya), *opas*, dan para pembantu memainkan *suling* dan *kacapi* sambil *nembang* di bagian belakang rumah. Seorang mantri guru, meskipun hanya memiliki rumah kecil, masih tetap berusaha menerima anak kerabat yang ikut menumpang. Di Bandung, sekitar daerah Jl. Lengkong, Jl. Pungkur, Jl. Dewi Sartika, Jl. Kautamaan Istri (Ciguriang), daerah Cihapit, dan Gempol banyak rumah milik *ménak intelektual* yang tidak memiliki banyak kamar, hanya cukup untuk keluarga inti.

Perabotan rumah yang ada di kabupaten ataupun *regentswoning* dan juga di rumah kaum *ménak* umumnya, seperti kursi-meja, lemari, dan tempat tidur, pada umumnya terbuat dari kayu jati berkualitas tinggi. Perabotan ini diukir secara artistik oleh para tukang atau seniman, baik lokal maupun dari luar

daerah. Ayah R.A. Kartini dari Jepara pernah mengirim seperangkat meja makan, lemari, dan penyekat ruangan kepada Pangeran Aria Suria Atmaja, Bupati Sumedang. Hingga kini perabot itu masih dapat dilihat di Museum Prabu Geusan Ulun Kabupaten Sumedang.

Perabotan lainnya yang berupa aksesoris ruangan seperti lampu robyong, jam, bokor, tempat sirih, pot bunga, yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kuningan, perak, tembaga, dapat di temukan sisa-sisanya di rumah keturunan kaum *ménak*. Makin tinggi kedudukannya dalam pangreh praja, makin tinggi pula kualitas serta kuantitas barang yang dimiliki kaum *ménak*. Peralatan makan bupati dan keluarganya seperti piring, sendok-garpu, piala, nampan, mangkuk sayur, termasuk tusuk sate, dibuat dari bahan perak berukir indah. Di rumah *ménak tertinggi* derajatnya ini mudah dijumpai gelas-gelas anggur, piala, dan lampu kristal yang diimpor dari Eropa.

Alat musik tradisional seperti gamelan, selain dianggap sebagai pusaka, juga dianggap sebagai perabotan lambang status. Di Kabupaten Bandung, selain alat musik tradisional, juga ada alat musik Barat seperti piano. Anak-anak Bupati R.A.A. Wiranatakusumah V, mendapat les privat piano dari seorang guru Belanda. Kemewahan dan kemegahan perabotan milik para bupati ini tentu saja sesuai dengan kekayaan mereka. Seperti telah diungkapkan di muka, kekayaan para bupati di Priangan tidaklah sama sehingga pemilikan isi rumah juga berbeda. Di gedung Kabupaten Sumedang yang kini dijadikan Gedung Museum Prabu Geusan Ulun, masih tersimpan barang-barang milik para bupati. Misalnya, ranjang bercat hijau-kuning yang merupakan peninggalan Prabu Geusan Ulun pada abad ke-17 dan satu set meja rias istri bupati yang terbuat dari kayu jati berukir dicat warna merah dan keemasan. Di atas meja rias terdapat kotak perhiasan dan kotak sirih yang terbuat dari bahan sama. Menurut cerita keturunan Bupati Sumedang, sebelum zaman Jepang masih ada sebuah ranjang mas (dicat emas?) tempat tidur para bupati yang dipakai secara turun-temurun. Selain itu, perlengkapan ruang kerja bupati yang terdiri atas meja tulis, lemari buku, dan jam meja buatan Eropa masih terawat baik hingga sekarang.

Di Kabupaten Tasikmalaya masih ada sebagian kecil barang-barang peninggalan para bupati sejak kabupaten itu bernama Sukapura sampai menjadi Tasikmalaya. Perabotan yang disimpan di rumah salah seorang keturunan bupati, hanya sisa-sisa peralatan makan dari perak dan kristal, alat berhias, dan tempat sirih,

yang kurang terawat. Bupati Sukapura tidaklah tergolong bupati yang kaya bila dibandingkan dengan bupati Priangan lainnya meskipun digambarkan dalam sumber tradisional sebagai amat kaya raya. Seperti telah dijelaskan di muka, sekitar pertengahan kedua abad ke-19 bupati belum memiliki keraton yang dianggap pantas; hal ini mungkin terjadi karena biaya yang diperlukan untuk itu tidak ada. Apalagi kalau mengingat bahwa daerah ini sejak awal abad ke-19 kurang menghasilkan kopi sehingga pernah dihapuskan sampai dua kali. Bila dibandingkan dengan peninggalan-peninggalan Bupati Sumedang yang masih ada sekarang, jelas bahwa Bupati Sukapura tidaklah memiliki kekayaan sebanyak Bupati Sumedang.

Dapat diperkirakan bahwa semua perlengkapan rumah tangga pada dasarnya sama saja di setiap kabupaten karena barang-barang semacam ini merupakan mode yang dengan mudah dapat dibeli sesuai dengan keadaan keuangan masing-masing. Di rumah kaum *ménak* yang bukan bupati, polanya juga sama saja, hanya berbeda dalam kualitas dan kuantitas. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang masih ada di rumah keturunan kaum *ménak* meski jumlahnya terbatas. Pengaruh Eropa dalam hal perabotan rumah ini tampak jelas. Di Kabupaten Sumedang misalnya, masih ada *bedcover* (penutup tempat tidur) dari bahan satin yang diimpor dari Perancis; gelas yang bermacam-macam bentuknya yang menunjukkan adanya diferensiasi fungsinya sebagai pengaruh Barat. Misalnya, ada gelas berbentuk U yang bertangkai untuk minum air putih dan gelas berbentuk sloki untuk minum *champagne* yang mangkuknya kecil, yang biasa digunakan pada pesta perkawinan dan Idul Fitri (Martanagara, 1923L 25; *Volksalmanak Soenda*, 1919: 130).

Kendaraan merupakan pelengkap rumah tangga seorang *ménak*. Pada abad ke-19 kendaraan berupa kereta berkuda hanya dimiliki para bupati. Kereta seperti ini digolongkan sebagai pusaka kabupaten. Misalnya, Bupati Sumedang memiliki kereta pusaka yang disebut *Naga Paksi*. Bupati-bupati lain pada umumnya juga memiliki kereta khusus untuk bepergian. Pada bagian belakang kereta biasanya dipasang payung lambang kebesaran bupati. Pada awal abad ke-20, para bupati mulai memiliki mobil sebagai kendaraan utama. Bupati Sumedang, dikabarkan sebagai bupati Priangan pertama yang memiliki mobil Fiat. Putri R.A.A. Wiranatakusumah V merasa bangga sekali bila mobil ayahnya yang bernomor D-4 datang menjemput ke sekolah,

karena saat itu mobil masih merupakan barang langka. Di kap mobil biasanya dipasang payung kecil lambang kabupaten yang berwarna kuning mas bergaris hijau. Seperti telah diungkapkan pada Bab III, ada bupati-bupati yang membeli mobil ini dengan pembayaran secara kredit (Soedarpo, : 36). *Ménak* bawahan bupati, pada abad ke-19, tidak banyak yang memiliki kereta kuda. Jaksa Bandung Radén Suryalaga pada akhir abad ke-19 diceritakan memiliki kereta yang ditarik dua ekor kuda. Hal ini dianggap sebagai hal yang luar biasa. Pada awal abad ke-20, Haji Hasan Mustapa, *Hoogdpenghulu* Bandung, disebutkan sering bepergian naik delman. Pada tahun 1930-an, seorang wedana atau pun *hoofddjaksa* yang dapat memiliki mobil masih dianggap sesuatu yang istimewa sekali (Ekadjati,1993:138).

### SIMPULAN

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kaum *ménak*, khususnya bupati-bupati, memiliki tempat tinggal yang polanya mirip satu sama lain. Kaum *ménak* bawahan bupati berusaha meniru gaya rumah bupati dan perabotannya. Bentuk rumah dan bagian-bagian rumah memiliki makna simbolis, sehingga rumah bergaya Eropa tidaklah mudah diterima oleh para bupati yang cenderung bersikap tradisional. Meskipun demikian, unsur-unsur Barat yang dianggap bermanfaat tidak mereka tolak; bahkan alat musik Barat seperti piano pun dianggap sebagai lambang status yang baru.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja et al., Kusnaka. (1981). *Tipe Rumah Tradisional Khas Sunda di Jawa Barat*, Bandung.
- De Commissie voor Het Adatrecht. (1914). *Adatrechtbundel*. VIII, XXIII, 'sGravenhage: Martinus Nijhoff.
- Djajadiningrat, P.A.A. (1937). *Kenang-kenangan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat*. Batavia: Balai Pustaka-Kolff-Buning.
- Eerde, J.C, van (1943). *De Volken van Nederlandsch-indie*; In *Monographieen*, II, Amsterdam: Elsevier.
- Ekadjati, Edi S. (ed.), 1991. *Wawacan Carios Munada*, Bandung; Fakultas Sastra Unpad.
- Hermansoemantri, Emuch. (1979). *Sajarah Sukapura; Sebuah Telaah Filologis*. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hoevell, WR van. (1849). *Reis over Java, Madura, en Bali*, eerste deel, Amsterdam: P.N. van Kampen.
- Kartadibrata, R.M.A. (1989). *Riwayat Kangjeng Pangeran Koesoemaadinata (Pangeran Kornel); Bupati Sumedang 1791-1828*. Sumedang: Museum Prabu Geusan Ulun.
- Kartadinata, Mas. 1921. *Rasiah Priangan*, Weltevreden: Volkslectuur.
- Kunto, Haryoto. (1986). *Semberbak Bunga di Bandung Raya*, Bandung, Granesia.
- Lubis, Nina H. (1998). *Kehidupan Kaum Menak Priangan*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Martanagara, R.A.A. (1923). *Babad Radén Adipati Aria Martanagara*, Bandoeng; Aurora.
- Mayer, L. Th. t.t. *Een Blick in het Javaansche Volksleven*, Leiden: E.J. Brill.
- Soedarpo, Mien. (1994). *Reminiscences of The Past*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Soeria Nata Atmadja, R.A.A.A. (1940). *De Regenten Positie*. Bandoeng: A.C. Nix & Co.
- Sutherland, Heather. (1983). *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, (terj.), Jakarta, Sinar Harapan,
- Tim Peneliti Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Unpad, (1991). *Sejarah Cirebon Abad Ketujuh Belas*, Bandung: Pemda Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Fakultas Sastra Unpad.
- Tim Peneliti Sejarah Galuh. (1972). *Galuh-Ciamis dalam Tinjauan Sejarah*.
- Volksalmanak Soenda*, (1919).